



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.45/ 01 /DPMPTSP-BLG/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung penyediaan informasi yang memadai;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemutakhiran informasi dengan menetapkan Daftar Informasi Publik Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Untuk penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama selaku Atasan PPID Pembantu;
- KELIMA** : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2024 telah tersedia dan diumumkan pada **ppid.balangkab.go.id** sebagai laman resmi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**


Dr. AKHRIANI, S.Pd. M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA						
1	Informasi Tentang Profil SKPD					
	- Profil	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Tugas dan Kewenangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Struktur Organisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Visi dan Misi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
2	Ringkasan Informasi Tentang Program dan / atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan SKPD					
	- Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	2023 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
3	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja SKPD					
	- Laporan Kinerja SKPD Tahun 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	2023 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
4	Ringkasan Laporan Keuangan SKPD					
	- Laporan Realisasi Anggaran SKPD 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	2023 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
5	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan / atau Kebijakan					
	- Produk SK Tim PPID Tahun 2024	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
	- Produk SK DIP Tahun 2024	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
6	Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik					
	- Seri Edukasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Tata Cara Pengajuan Keberatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
7	Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau					
	- Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik (SP4N - LAPOR)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
8	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa					
	- Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
9	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat					
	- Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	JF Analis Kebijakan	Kepala Dinas	2023 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT						
1	Daftar Informasi Publik SKPD					
	- Daftar Informasi Publik Tahun 2024	Kasubag Umum dan Kepegawalan	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
2	Data Perbendaharaan atau Inventaris SKPD					
	- Laporan Barang Milik Negara Tahun 2023	Kasubag Umum dan Kepegawalan	Sekretaris	2023 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
3	Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD					
	- Rencacana Strategis 2021-2026 /	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	2023 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
	- Rencana Kerja 2024	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
INFORMASI PUBLIK SERTA-MERTA						
1	- Jenis-jenis Izin	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
2	- Syarat-syarat Izin	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
3	- SK Tim Pelayanan Perizinan	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
4	- SK Pengaduan	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
5	- SK Videotron	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
6	- SK Monev SOP	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
7	- Alur Pelayanan	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
8	- Standar Pelayanan	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
9	- Standar Operasional Prosedur (SOP)	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
10	- Rekap Izin	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
11	- Profil Penanaman Modal	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2022 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan
12	- SK Tim Pengawasan Perizinan	JF Analisis Kebijakan	Kepala Dinas	2024 / SKPD	Hardcopy dan Softcopy	Sampai ada perubahan

Mengetahui,
Kepala SKPD
Selaku
Atasan Badan Publik



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002